



## ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Sarmini<sup>1)</sup>, Andi Afrizal<sup>2)</sup>

Managemen Faculty, University of Pasir Pengaraian

### Info Artikel

*Keywords:*  
transparansi,  
akuntabilitas,  
pengelolaan  
keuangan daerah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sampel penelitian menggunakan teknik *proportional random sampling* dengan jumlah sebanyak 87 orang. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi  $Y = 7.280 + 1,017X_1 + 1.426X_2$ . Secara parsial, diperoleh t-hitung transparansi 4.239 dan akuntabilitas 7.629. Secara simultan, diperoleh F-hitung 114.933. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 73,2% pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas, sedangkan sisanya 26,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini. Baik pada pengujian secara parsial (uji t) maupun pada pengujian secara simultan (uji F) seluruh variabel bebas yang terdiri dari transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## ANALYSIS OF THE EFFECT OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ON ROKAN HULU REGENCY FINANCIAL MANAGEMENT

### Abstract

*This study aims to determine the effect of transparency and accountability on local financial management in Rokan Hulu Regency. The population in this study are all officials who carry out regional financial management. The study sample used a proportional random sampling technique with a total of 87 people. Data collection methods using observation, questionnaires, documentation and interviews. Data analysis using multiple linear regression with the SPSS program. The results of multiple linear regression analysis obtained regression equation  $Y = 7.280 + 1.017X_1 + 1.426X_2$ . Partially, transparency count 4,239 and accountability 7,629 were obtained. Simultaneously, an F-count of 114,933 was obtained. The results showed that 73.2% of regional financial management was influenced by transparency and accountability, while the remaining 26.8% was influenced by other variables not examined in this study. The conclusion of this study. Both the partial test (t test) and the simultaneous test (F test) all independent variables consisting of transparency and accountability simultaneously affect the management of regional finances*

✉ Alamat korespondensi :  
Universitas Pasir Pengaraian  
E-mail: Sarmi@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan tata kelola keuangan secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan.

Manajemen keuangan yang rasional, adil, transparan dan bertanggungjawab tidak hanya dilihat dari jumlah anggaran yang diperoleh, tetapi lebih kepada tata kelola yang dilakukan oleh suatu daerah dalam mengelola anggaran tersebut. Pengelolaan anggaran dikatakan baik apabila telah menerapkan tiga komponen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Mardiasmo (2014:25) bahwa penerapan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi dapat dilihat dari minimalnya biaya yang dikeluarkan dan optimalnya hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Transparansi menurut Sumarsono (2009) adalah segala sesuatu berupa kegiatan ataupun kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah secara terbuka. Dengan adanya keterbukaan ini, maka seluruh aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas. Sedangkan akuntabilitas menurut Halim (2012:29) adalah suatu kewajiban pemerintah kepada masyarakat untuk mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Instrumen utama dari akuntabilitas adalah anggaran pemerintah, Sukesti (2011) mengatakan bahwa anggaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jelas dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Transparan disini maksudnya adalah sebuah kondisi dimana masyarakat atau publik bisa mengetahui dengan jelas seluruh kebijaksanaan dan tindakan yang diambil dalam melaksanakan fungsi beserta sumber daya yang dimanfaatkannya. Sedangkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah suatu bentuk wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam

mengelola keuangan daerah kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bentuk evaluasi pada tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Pada struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas, Badan dan Kantor merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti, karena kinerja SKPD merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang akan menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah (PP.No. 41 Tahun 2007). Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga berhubungan erat dengan akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam sistem demokrasi yang terbuka, akses ini disediakan oleh media seperti: surat kabar, majalah, radio, televisi dan internet.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang menekankan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pada tanggal 21 Januari 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu bersama dengan Direktur PT. Bank Riau Kepri sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang disaksikan oleh BPK-RI mengenai penerapan akses data transaksi rekening Pemerintah Daerah secara online (Kasda Online) sebagai salah satu yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan transaksi keuangan. (<https://bpkadrohul.com>, diakses 22 Januari 2019)

Kemudian, pada pertengahan tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPK-RI mengenai pengimplementasian SIMDA Integrated dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan SIMDA Integrated ini harapannya akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan, karena seluruh kegiatan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan, baik itu pelaporan keuangan maupun pelaporan kinerja dapat diamati dan ditelusuri dari satu perangkat yang sama. (<https://www.bpkp.go.id>, diakses 09 Agustus 2019).

Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 s.d 2019 terus menunjukkan perubahan yang positif dimana pada tahun 2016 s.d 2018 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun walaupun demikian, menurut BPK-RI sistem pengelolaan keuangan di beberapa daerah di Indonesia masih menemukan adanya beberapa permasalahan, seperti: a) Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI); b) Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan c) Penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. (<https://koranindonesia.id>, diakses 05 Oktober 2018).

Di Kabupaten Rokan Hulu, permasalahan utama pengelolaan keuangan daerah adalah mengenai penggunaan anggaran yang tidak berjalan secara efektif dan efisien sehingga berdampak pada minimnya penyerapan anggaran APBD pada beberapa SKPD. Karena penyerapan anggaran minim, maka program dan kegiatan berjalan lambat, selain itu timbulnya kesan kebiasaan menghabiskan anggaran diakhir tahun sehingga hasilnya menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2018 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu bagian Pelaporan dan Akuntansi, ada beberapa SKPD yang tidak mencapai target, seperti pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, Dinas Peternakan dan Perkebunan dan juga Badan Pendapatan Daerah, realisasi pendapatan pada tahun 2018 tidak mencapai 50% dari target anggaran pendapatannya. Selain itu, realisasi belanja tahun 2018 pada Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dan Dinas Komunikasi Dan Informatika masih dibawah 75% dari target anggaran belanja. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Belanja dari masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel 1.2 di bagian lampiran proposal ini:

Selain permasalahan penggunaan anggaran yang tidak berjalan secara efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga belum menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik. Dimana berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 setiap daerah diwajibkan memiliki webside resmi untuk mempublikasikan seluruh dokumen anggaran dan *update* data yang ada sebagai bentuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki *webside* tersebut, akan tetapi hanya

sebagian dokumen anggaran saja yang baru dipublikasikan kemudian untuk update data secara berkala juga belum terlaksana (<http://bpkadrohul.com>, diakses 07 Januari 2018)

Permasalahan diatas diduga bisa saja terjadi karena belum menyeluruhnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya transparansi dalam mengambil kebijakan anggaran, kesepakatan bersama antara MUSPIDA, DPR dan Pemerintah Daerah. Kemudian ada akuntabilitas pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan, adanya wewenang dan tanggungjawab yang jelas, pertanggungjawaban alokasi dana yang jelas, dan seluruh proses yang didukung dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka masalah seperti yang diuraikan diatas dapat diminimalisir, sehingga pengelolaan APBD yang ekonomis, efisien dan efektif dapat terlaksana, dan good goveranve dapat tercapai.

Penelitian yang terkait transparansi dan akuntabilitas pernah dilakukan oleh Yanuarisa, dkk (2011), dimana penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan makna dasar dari transparansi dan akuntabilitas melalui pendekatan fenomenologi transendental. Adapun makna dari transparansi dalam anggaran berbasis kinerja mencakup keterbukaan proses anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat disertai penyampaian kebijakan anggaran sebagai suatu kewajiban yang disertai "kerelaan" yang didukung dengan aksebilitas dokumen anggaran sebagai tindakan "membuka jalan" menuju kepada dokumen-dokumen anggaran yang diperlukan untuk publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempertanggungjawabkan anggaran yang diamanahkan masyarakat dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan akuntabilitas *performance based budgeting* dimaknai dari tugas pokok dan fungsi yang merupakan informasi kinerja dalam perencanaan kinerja sebagai dasar alokasi *performance based budgeting* untuk membantu pertanggungjawaban anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Evaluasi kinerja sebagai umpan balik atas hasil kinerja saat ini dan masa lalu sebagai dasar dan pelajaran untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah daerah yang masih memerlukan perbaikan.

Didalam setiap kegiatan yang dilakukan tentu ada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, begitu juga dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

Seluruh hak maupun kewajiban yang bisa dinilai dengan kekayaan, ataupun barang yang dapat menjadi sumber kekayaan daerah dan belum dikuasai/dimiliki oleh Negara/Daerah atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku adalah pengertian dari Keuangan Daerah (Halim, 2012:29)

Menurut Halim (2012:32), tolak ukur atau indikator yang sering digunakan untuk melihat sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah:

1. Pengelolaan anggaran yang ekonomis  
Yaitu suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.
2. Pengelolaan anggaran yang efektif  
Yaitu menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya suatu unit organisasi (misal: staf, upah, biaya, administrasi) dan keluaran yang dihasilkan memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (efisiensi dari proses internal).
3. Pengelolaan anggaran yang efisien  
Yaitu menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.
4. Pengelolaan anggaran yang adil dan merata  
Yaitu menggambarkan penggunaan anggaran yang sesuai berdasarkan kegiatan.

Menurut Bastian (2016) APBD adalah suatu draf keuangan tahunan dari pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan daerah dengan masa pelaksanaan selama 1 (satu) tahun

anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Mardiasmo (2012:35) menyatakan bahwa presentase laporan keuangan secara terbuka adalah salah satu bentuk pemberian informasi yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPRD dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan secara langsung untuk dapat mengawasi setiap kebijakan publik yang diambil dalam menjalankan program dan kegiatan, sehingga kecurangan dan kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu dapat dicegah.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur apakah suatu pengelolaan keuangan dilakukan secara transparansi atau tidak menurut Halim (2012:33), adalah:

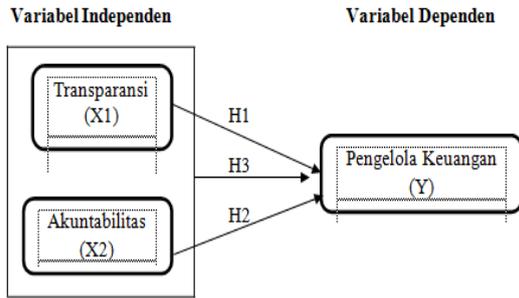
1. Pengumuman kebijakan anggaran  
Yaitu memberitahukan jumlah anggaran yang ada tanpa ada yang ditutupi.
2. Dokumen anggaran yang mudah diakses  
Yaitu kemudahan akses secara luas terhadap besarnya anggaran.
3. Laporan pertanggungjawaban tepat waktu  
Yaitu penyampaian laporan kegiatan dari anggaran yang digunakan tseseuai pada waktunya.
4. Sistem pemberian informasi pada publik  
Yaitu penyampain informasi kemasyarakat secara terorganisir dan relevan.

Akuntabilitas adalah bentuk dari pertanggung jawaban entitas pelapor secara periodik atas pengelolaan sumber daya ataupun kebijakan. Sedangkan menurut Halim (2012:27), akuntabilitas adalah pertanggung jawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh pejabat amanah dalam hal ini pemerintah daerah kepada sipemberi amanah atau masyarakatsebagai pihak yang mempunyai hak untuk memohon pertanggungjawaban tersebut.

Selanjutnya menurut Halim (2012:34) beberapa indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dalam pengelola keuangan daerah, yaitu:

1. Informasi pengelolaan secara terbuka, cepat dan tepat
2. Pelayanan yang memuaskan bagi publik
3. Partisipasi publik
4. Menjelaskan dan mempertanggung jawabkan kebijakan publik
5. Sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintahan.

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

**METODE**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sampel penelitian menggunakan teknik *proportional random sampling* dengan jumlah sebanyak 87 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Variabel bebas dalam penelitian ini transparansi (X1), akuntabilitas (X2) dan variabel terikat pengelolaan keuangan daerah (Y). Metode pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil uji validitas masing-masing item pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. Dapat dikatakan valid karena nilai *pearson correlate* nya lebih besar dibandingkan dengan nilai  $r_{tabel} = 5\%$ ,  $df = n-2$ , dimana  $n = 87$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah pernyataan sebanyak 28 pada penelitian ini semuanya valid. berdasarkan atas pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai *cronbach's alpha*. Didapatlah nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari nilai *cut off* yang ditentukan yaitu sebesar 0.60. Sehingga dapat disimpulkan baik untuk variabel independen maupun variabel dependen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.55724648
Most Extreme Differences	Absolute	.166
	Positive	.126
	Negative	-.166
Kolmogorov-Smirnov Z		1.546
Asymp. Sig. (2-tailed)		.071

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2020

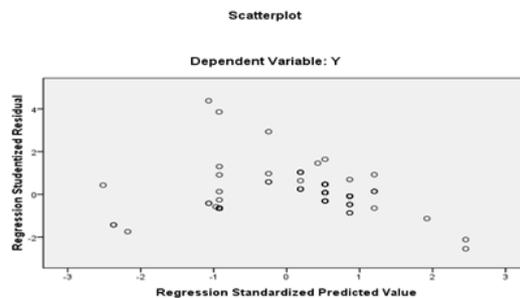
Dilihat dari Tabel 1, terlihat bahwa *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 1.546 dan nilai *Asymp.sig.* sebesar 0,071, sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi data residual normal. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.280	1.655		
	Transparansi	1.017	.240	.158	7.150
	Akuntabilitas	1.426	.187	.158	7.150

a. Dependent Variable: Y  
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2020

Hasil uji *Multikolinieritas* pada Tabel 2. menunjukkan nilai VIF dibawah 10 dan nilai Tolerance tidak < 0.1, hal ini berarti bahwa diantara variabel independen didalam penelitian ini tidak terjadi hubungan atau tidak memiliki hubungan satu sama lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat *Multikolinieritas*.



**Gambar 2.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Pengolahan data spss, 2020

Dari grafik *scatterplot* yang ada pada gambar 2. dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2011:284).

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Regersi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.280	1.655		
	Transparansi	1.017	.240	.158	7.150
	Akuntabilitas	1.426	.187	.158	7.150

a. Dependent Variable: Y

Sumber :Hasil Olahan Data SPSS, 2020

Berdasarkan Tabel 3. persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 7.280 + 1,017X_1 + 1.426X_2 + e$$

Interpretasi:

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 7.280, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel transparansi dan akuntabilitas dianggap konstan (0), maka nilai pengelolaan keuangan daerah sebesar 7.280.
2. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 1.017 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1% variabel transparansi akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sebesar 1,639.
3. Koefisien regresi X2 sebesar 1.426 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1% variabel akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sebesar 1.426. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang tinggi bisa meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan terjadi hubungan positif yaitu dengan adanya kenaikan variabel akuntabilitas, maka pengelolaan keuangan daerah akan meningkat.

**Tabel 4.**  
**Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.856 <sup>a</sup>	.732	.726	2.588

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber :Hasil Olahan Data SPSS, 2020

Hasil pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS, maka diketahui koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yang diperoleh sebesar 0,732. Hal ini berarti 73,2% pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel transparansi dan akuntabilitas, dengan kata lain bahwa variabel independent memberi pengaruh bersama sekitar 73,2% terhadap variabel dependent. Sedangkan sisanya adalah (100% - 73,2% = 26,8%) pengelolaan keuangan daerah dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini atau sebab-sebab yang lain diluar model.

Berdasarkan hasil deskriptif diperoleh bahwasanya transparansi keuangan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Rokan Hulu berada pada kriteria cukup baik. Ini dapat dilihat dengan hasil yang tertinggi pada variabel transparansi pada pernyataan nomor 6 yaitu laporan pertanggung jawaban Keuangan Pemda Kabupaten Rokan Hulu selalu disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan dengan nilai TCR sebesar 71,5% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden pada kriteria baik, sedangkan yang paling rendah pada pernyataan nomor 2 yaitu informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran dengan nilai TCR sebesar 69,2% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden pada kriteria baik.

Berdasarkan hasil deskriptif diperoleh bahwasanya akuntabilitas keuangan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Rokan Hulu berada pada kriteria baik. Ini dapat dilihat dengan hasil yang tertinggi pada variabel akuntabilitas pada pernyataan nomor 6 yaitu masyarakat mengetahui tentang APBD dan pernyataan nomor 7 yaitu pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat dengan nilai TCR sebesar 71,3% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden pada kriteria baik, sedangkan yang paling rendah pada pernyataan nomor 1 yaitu Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat dengan nilai TCR sebesar 69,7% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden pada kriteria baik.

Berdasarkan hasil deskriptif diperoleh bahwasanya Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Rokan Hulu berada pada kriteria baik. Ini dapat dilihat dengan hasil yang tertinggi pada variabel pengelolaan keuangan daerah pada pernyataan nomor 6 yaitu pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah dengan nilai TCR sebesar 75,6% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden pada kriteria sangat baik, sedangkan yang paling

rendah pada pernyataan nomor 3 yaitu setiap program kerja yang dilaksanakan dan dikelola secara efektif sesuai dengan target yang direncanakan dengan nilai TCR sebesar 69,2% dengan klasifikasi Tingkat Capaian Responden pada kriteria baik.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS, maka pada bagian ini akan dibahas hasil perhitungan yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jelas dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Transparan disini maksudnya adalah sebuah kondisi dimana masyarakat atau publik bisa mengetahui dengan jelas seluruh kebijaksanaan dan tindakan yang diambil dalam melaksanakan fungsi beserta sumber daya yang dimanfaatkannya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Kusumah dan Vabiani (2019) serta penelitian Umar dkk (2018), yang menunjukkan terdapat pengaruh transparansi secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah suatu bentuk wujud pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola keuangan daerah kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bentuk evaluasi pada tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Sejalan dengan Sukesti (2011) mengatakan bahwa anggaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Kusumah dan Vabiani (2019) serta penelitian Umar dkk (2018), yang menunjukkan terdapat pengaruh akuntabilitas

secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan keuangan daerah. Transparansi menurut Sumarsono (2009) adalah segala sesuatu berupa kegiatan ataupun kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah secara terbuka. Dengan adanya keterbukaan ini, maka seluruh aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas. Sedangkan akuntabilitas menurut Halim (2012:29) adalah suatu kewajiban pemerintah kepada masyarakat untuk mempertanggung jawabkan seluruh anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Instrumen utama dari akuntabilitas adalah anggaran pemerintah, Sukesti (2011) mengatakan bahwa anggaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Kusumah dan Vabiani (2019) serta penelitian Umar dkk (2018), yang menunjukkan terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari penyampaian laporan pertanggung jawaban Keuangan Pemda Kabupaten Rokan Huluyang selalu disajikan tepat waktu.
2. Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya partisipasi publik serta adanya pertanggung jawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat terkait APBD
3. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rokan Hulu sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dilihat dari efisiensi pengelolaan anggaran dalam setiap pelaksanaan program kerja.
4. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu yang dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 73,2%. Sedangkan sisanya 26,8% pengelolaan keuangan daerah dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti

dalam penelitian ini atau sebab-sebab yang lain diluar model.

Dari kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu masih perlu untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan undang-undang No.14 tahun 2008 yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan membuka akses publik terhadap masyarakat diharapkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu masih perlu untuk meningkatkan akuntabilitasnya dengan mengetahui mengenai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pekerjaannya sehingga pengelolaan keuangan pemerintah terlaksana secara efektif yang dikomunikasikan melalui jaringan efektif dan memberikan pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sejenis, penulis menyarankan sebaiknya untuk menambahkan jumlah sampel yang banyak dan tidak terbatas pada beberapa kantor pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2016). *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Darise, Nurlan. (2011). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks, Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2011). *Statistik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Halim dan Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.
- <https://www.bpkp.go.id>, diakses 09 Agustus 2019
- <https://koranindonesia.id>, diakses 05 Oktober 2018
- <https://riausky.com>, diakses 22 Januari 2019
- Indriantoro (2012). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Gramedia.
- Mardiasmo, (2014). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: good governance democraton local government financial management transparancy public policy* , Andi, Yogyakarta;
- Mardiasmo (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Noordiawan, Putra, Rahmawati (2011). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Novatiani Ait, Kusumah R. Wedi Rusmawan, Vabiani Diandra Pepi. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Universitas Widyatama. Bandung.
- Renyowijoyo Muindro, 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 01 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Method for Business*. Jakarta. Salemba Empat.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sumarsono, Hadi (2009). *Analisis kemandirian Otonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1 No.1, 2009
- Umar Zulkifli, Syawalina Fittika Cut dan Khairunnisa. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. Jurnal Kolegial. Volume 6.Nomor 2. Universitas Muhammadiyah. Aceh.
- Yanuarisa Yesika, Rosidi, dan Irianto Gugus. (2011). Fenomenologi Transendental Dalam Transparansi dan Akuntabilitas Performance Based Budgeting. Jurnal Aplikasi Manajemen. Volume 12.Nomor 2. Universitas Brawijaya. Jawa Timur.

Berisi hasil penelitian empiris atau kajian teoritis yang ditulis dengan sistematis, analisis yang kritis, dan informatif. Penggunaan tabel, gambar dsb hanya sebagai pendukung yang memperjelas pembahasan dan dibatasi hanya pada pendukung yang benar-benar substantial, misalnya tabel hasil pengujian statistik, gambar hasil pengujian model dsb. Pembahasan hasil bersifat argumentatif menyangkut relevansi antara hasil, teori, penelitian

terdahulu dan fakta empiris yang ditemukan, serta menunjukkan kebaruan temuan.

Setiap tabel dituliskan tanpa garis vertikal dan dilengkapi dengan sumber tahun pengolahan data penelitian. Gambar atau grafi setidaknya ditampilkan secara jelas dan bisa dibaca. Tabel, gambar dan grafik diletakkan pada bagian atas atau bawah

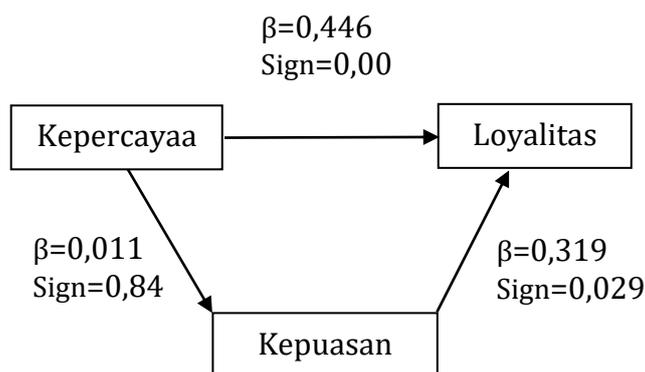
dengan judul diletakkan di atas untuk tabel dan diletakkan di bawah untuk gambar dan grafik dengan rata kiri. Hindari penjelasan tabel dan gambar dengan menggunakan kata “Tabel di atas, gambar di bawah, Tabel berikut, dsb” namun sebutkan tabel secara jelas menggunakan nama seperti Tabel 1, Gambar 2, dsb. Penulisan kata Tabel 1, Gambar 2 harus di cetak tebal.

**Tabel 1.** Hasil Uji Heteroskastesisitas Uji *Glajser*

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.725	.912		.796	.428
	Kualitas_produk	.013	.038	.082	.356	.723
	Kualitas_pelayan n	.010	.054	.041	.179	.858

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: data yang diolah (2015)



**Gambar 1.** Uji Mediasi

Sumber: data yang diolah (2015)

**SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian,

dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik. Ditulis sepanjang satu paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numerical.

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad nama penulis.

Ketentuan nama penulis: nama yang ditampilkan adalah nama akhir (nama keluarga) penulis diikuti dengan singkatan nama awal (dan tengah jika ada). Jika penulisnya lebih dari satu orang, maka cara penulisannya sama.

Penulisan judul rujukan diawali dengan huruf kapital hanya pada awal kalimat.

Setiap penulisan nama, tahun, judul artikel dan seterusnya diakhiri dengan titik (.) sebelum dilanjutkan kata berikutnya. Khusus penulisan volume (nomor) jurnal diberi tanda titik dua (: ) tanpa jarak spasi. Contoh-contoh penulisan dapat dilihat pada penjelasan setiap jenis pustaka yang layak dirujuk.

Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam jurnal ilmiah, ditulis mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul artikel. nama jurnal. volume(nomor): halaman (Nama jurnal diketik miring).

Contoh:

Wartini, S. & Harjiyanti, W. 2014 Organizational Commitment As The Black Box To Connect The Islamic Work Ethics And Employees Behavior Toward Organizational Change. *Jurnal Dinamika Manajemen*. 5 (2): 228-240

Baskoro, C. A. 2014. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Management Analysis Journal*. 3 (2): 1-12

Apabila sumber pustaka berupa buku teks, ditulis mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul buku. volume (jika ada). edisi (jika ada). kota penerbit: nama penerbit (Judul buku dicetak miring).

Contoh:

Winardi. 2012. *Pemotivasian Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers

Ghozali, I. 2011. *Ekonometrika*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Apabila sumber pustaka berupa buku terjemahan ditulis mengikuti urutan: nama penulis asli. tahun buku terjemahan. judul buku terjemahan. volume (jika ada). edisi (jika ada). terjemahan. kota penerbit: nama penerbit (Judul buku di cetak miring).

Contoh:

Robbins, S. P. 2009. *Organizational Behavior*. Mary K. Coulter, Management, 5e. New Jersey: Prentice Hall.

Robbins, S & Judge, T. 2011. *Organizational behavior*. 14th edition. New Jersey: Prentice Hall.

Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam buku kumpulan artikel ditulis mengikuti urutan: nama penulis artikel. judul artikel. dalam: nama editor jika ada diikuti Ed (jika tunggal) atau Eds (jika lebih dari satu) dalam tanda kurung. tahun.judul buku. volume (jika ada). edisi (jika ada). kota penerbit: nama penerbit (Judul buku dicetak miring).

Contoh:

Ancok, D. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. dalam: Singarimbun M dan Efendi (Eds). 1999. *Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3ES

Linz, J & Stephan, A. Some thought on decentralization, devolution and the many varieties of federal arrangements. In: Jhosua K (Ed). 2001. *Crafting Indonesian Democracy*. Bandung: Penerbit Mizan

Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam prosiding ditulis mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul naskah seminar. judul prosiding. tempat penyelenggaraan seminar. waktu penyelenggaraan (Judul artikel dicetak miring).

Contoh:

Rahayu, E.S. 2001. Potensi alelopati lima kultivar padi terhadap gulma pesaingnya. *Prosiding Konferensi Nasional XV Himpunan Ilmu Gulma Indonesia (Buku 1)*. Surakarta 17-19 Juli 2001

Apabila sumber pustaka berupa karya ilmiah yang tidak dipublikasikan (misal: skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian), ditulis mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul laporan penelitian. nama proyek penelitian. kota penerbit: instansi penerbit/lembaga (Tulisan skripsi/tesis/disertasi/laporan penelitian dicetak miring).

Contoh:

Kasip, L. M. 2000. Pembentukan galur baru ulat sutera (*Bombyx mori* L) melalui persilangan ulat sutera bivoltine dan polyvoltine. *Disertasi*. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Aritonang, M.W. 2004. *Kajian penyakit ayam broiler pada kandang close house*. Skripsi. Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor

Apabila sumber pustaka berupa artikel dalam surat kabar/majalah umum, ditulis mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul artikel. nama surat kabar/majalah. kota, tanggal terbit dan halaman (Judul artikel dicetak miring).

Contoh:

Syamsuddin, A. 2008. Penemuan hukum ataukah perilaku chaos? *Kompas*. Jakarta. 4 Januari. Hlm.16

Kukuh, A. 2008. Obsesi pendidikan gratis di Semarang. *Suara Merdeka*. Semarang 5 Maret. Hlm. L

Apabila sumber pustaka berupa artikel jurnal online, ditulis dengan urutan: nama penulis. tahun. judul artikel. nama jurnal. volume(nomor): halaman (Nama jurnal dicetak miring).

Contoh:

- Ernada, S.E. 2005. Challenges to the modern concept of human rights. *J. Sosial-Politika*. 6(11): 1-12
- Suparta, O., Sudradjat dan Sasmit, T. 2002. Pengaruh perlakuan kepadatan ulat sutera terhadap produksi dan mutu kokon di Tabing, Kabupaten Solok Sumatera Barat. *Buletin Penelitian Kehutanan*. 18(1) : 70-81
- Apabila sumber pustaka berupa artikel online (internet) tanpa tempat terbit dan penerbit, ditulis mengikuti urutan: nama penulis. tahun. judul artikel. Diunduh di alamat website tanggal (Judul artikel dicetak miring).

Contoh:

- Rusdiyanto, E. 2001. Peranan tanaman dalam mengurangi Pb dari emisi gas buang kendaraan bermotor di Jakarta. Diunduh di <http://www.ut.ac.id/olsupp/FMIPA/LING112/Peranan-tan-htm> tanggal 2 Juli 2002
- Levy, M. 2000. Environmental scarcity and violent conflict: a debate. Diunduh di <http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/PROGRAMS/DIS/ECS/report2/debate.htm> tanggal 4 Juli 2002